

<b>PROVINSI PAPUA TENGAH</b>		<b>SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)</b>																		
		Nomor: 37.00/04.0/000296/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023																		
Nomor SPM : 37.00/03.0/000328/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 Tanggal : 21 Desember 2023 SKPD : MAJELIS RAKYAT PAPUA		Dari : BUD Tahun Anggaran : 2023																		
<p>Bank Pengirim : Bank Papua Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 900.01.02.111112-2 Uang sebesar Rp220.900.000 (terbilang: dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)</p>																				
<p>Kepada : TERLAMMPR NPWP : 405253931954000 No. Rekening Bank : 0000000000 Bank Penerima : Bank Papua Kepatuhan Untuk : Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif MRP (Bagian Keuangan) Sub Kegiatan Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Pada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sesuai daftar terlampir (OTSUS BG) Pagu Anggaran : Rp3.730.756.429 Sumber Dana : 1.2.01.03 Dana Otonomi Khusus</p>																				
<b>NO</b>	<b>KODE KEGIATAN</b>	<b>URAIAN</b>		<b>JUMLAH (Rp)</b>																
1	9.02.02.3.02	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban		Rp220.900.000																
2	9.02.02.3.02.01	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota		Rp220.900.000																
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		Rp220.900.000																
				Jumlah	Rp220.900.000															
<p><b>Putongan-potongan:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian (No. Rekening)</th> <th style="text-align: center;">Jumlah (Rp)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PPH 21</td> <td style="text-align: center;">10.907.500</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: center;">10.907.500</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan		1.	PPH 21	10.907.500				Jumlah	10.907.500			
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan																	
1.	PPH 21	10.907.500																		
	Jumlah	10.907.500																		
<p><b>SP2D yang Dibayarkan</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Jumlah yang Diminta (Bruto)</td> <td style="text-align: center;">Rp220.900.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td style="text-align: center;">Rp10.907.500</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td style="text-align: center;">Rp209.992.500</td> </tr> <tr> <td>Jumlah yang Dibayarkan</td> <td style="text-align: center;">Rp220.900.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah</p>					Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp220.900.000	Jumlah Potongan	Rp10.907.500	Jumlah Netto	Rp209.992.500	Jumlah yang Dibayarkan	Rp220.900.000								
Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp220.900.000																			
Jumlah Potongan	Rp10.907.500																			
Jumlah Netto	Rp209.992.500																			
Jumlah yang Dibayarkan	Rp220.900.000																			
		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> <small>29 Desember 2023</small>  <small>PEMERINTAH</small>  <small>BENDAHARA UMUM DAERAH</small>  <b>BPPKA</b>  <small>JOHANTONO TENOUYE, S.E.</small>  <small>NIP. 197001291997011001</small> </div>																		
<p>Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk      Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran      Lembar 3: Arsip Kuasa BUD      Lembar 4: Pihak Penerima</p>																				

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH  
GELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Kel. Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire - Papua Tengah 98811

RP

OKWS

325

220.900.000

CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SP2D-LS

Honorarium/Penghasilan lainnya, Lembur,  
dan Biaya Perjalanan Dinas

- Ringkasan SPP-LS;
- Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian obyek;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
- Pengantar SPM-LS;
- SPM-LS;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS
- Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
- SK Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan/Penetapan Jabatan (pada awal pencairan);
- Daftar Penerimaan Honorarium;
- Daftar Potongan & E-biling PPh 21 (apabila ada);
- Surat Tugas/Surat Perintah Tugas;
- Surat Perintah Lembur;
- Daftar Pembayaran Lembur;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- Visum SPPD;
- Bukti Tiket, boarding pass Pesawat dan Hotel;
- Kwitansi Bermaterai Penerima SPPD;
- Lembar Verifikasi PPK-SKPD;
- Berkas salinan 2 rangkap dan PDF asli.

Yang memverifikasi

Nabire, 29 des 2023  
Mengetahui/Menyetujui  
Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan

NIP.

  
Much Suroto, ST  
NIP. 19740221 200012 1 005

\* Daftar Penerima honor pengas. Pakai Golongan ✓  
✓ Susunan Keanggotaan Panitia dibentukkan ✓  
\* No Rek Bank Salan di SPM ✓

① Jumlah di daftar . Rp . 29.300.000 x

② SPM Rp 220.900.000 ✓

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH  
MAJELIS RAKYAT PAPUA  
Jl. Mandala-Kelurahan Bumi Wonorejo Kabupaten Nabire

Nomor : 900/789/SET/MRP/2023  
Lampiran : 1 ( Satu ) Berkas  
Sifat : Penting  
Hal : Pengantar SPM LS

Nabire 21 Desember 2023

Kepada

Yth . Kepala Bidang Perbendaharaan  
BPPKAD Provinsi Papua Tengah

di

N A B I R E

Berdasarkan Peraturan Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka kami kirimkan SPM-LS untuk Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif MRP (Bagian Keuangan) Sub Keg. Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota (OTSUS BG) untuk keperluan Sekretariat MRP Provinsi Papua Tengah sebagaimana berikut :

No	SPM		Penerima (Pihak Ketiga)	Jumlah yang diminta
	Tanggal SPM	Nomor SPM		
1.	21 Desember 2023	37.00/03.0/000328/ LS/9.03.0.00.0.00.2 2.0000/P.03/12/2023	TERLAMPIR	Rp.220.900.000

Demikian untuk diketahui dan mohon persetujuannya



Dokumen Checklist/ Penelitian Kelengkapan SPM-LS  
LIST/ PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-LS

- LS Pengadaan Barang dan Jasa
- Ringkasan SPP-LS;
- Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian obyek;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
- Pengantar SPM-LS;
- SPM-LS;
- Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS;
- Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
- Bukti Pembayaran yang Sah (asli bermeterai) Kwitansi yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerima Pembayaran;
- Bukti pembelian/nota pembelian (*untuk pengadaan/pembelian sampai dengan Rp. 10.000.000,-*);
- Bukti pembelian/nota pembelian dan surat pesanan (*untuk pengadaan diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-*);
- Berita Acara hasil pelelangan ;
- RAB;
- Faktu Barang ;
- Faktur Tagihan;
- Dokumentasi Barang ;
- Pembayaran Dokumen Lelang apabila lewat proses lelang ;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh ASET ;
- Surat Permohonan Pembayaran;
- Berita Acara Pembayaran;
- Jaminan pelaksanaan apabila nilai kontrak lebih dari 200juta ;
- Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%);
- Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya;
- Surat Perjanjian/Kontrak beserta lampiran-lampirannya;
- Surat Perintah Pengiriman untuk barang;
- Referensi bank;
- Surat Jaminan bank;
- Fotocopy rekening giro bank;
- Fotocopy NPWP/PKP;

Perincian Penggunaan Dana per kode rekening belanja yang  
dari SPM dan Perhitungan Pajaknya;  
G PPh dan PPN;  
uktur pajak;  
anda Bukti Pembayaran Pajak Daerah apabila ada;  
nyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku

**PPK-SKPD/PPK Unit SKPD**  
**PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN**

Nama : MATILDA MOSE, S.Sos  
Tanggal : 21 Desember 2023  
NIP : 197105062003122008  
Tanda Tangan : 

**PROVINSI PAPUA TENGAH**  
**SURAT PERINTAH MEMBAYAR**  
**Langsung (LS)**

No. SPM: 37.00/03.0/000328/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

<p><b>DAERAH</b>  <b>PAPUA TENGAH</b></p> <p>D kepada:</p> <p>: MAJELIS RAKYAT PAPUA</p> <p>: TERLAMPIR</p> <p>: 0000000000</p> <p>: Bank Papua</p> <p>: 405253931954000</p> <p>Daftar Pembayaran : 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023</p> <p>Sumber Dana : 1.2.01.03 Dana Otonomi Khusus</p> <p>Untuk Keperluan:  Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif MRP (Bagian Keuangan) Sub Kegiatan Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Pada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sesuai daftar terlampir (OTSUS BG)</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>Potongan-potongan:</b></td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">Uraian (No. Rekening)</th> <th style="text-align: center;">ID Billing</th> <th style="text-align: center;">Jumlah</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">PPH 21</td> <td style="text-align: center;">028339540015075</td> <td style="text-align: center;">Rp10.907.500</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Jumlah</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Rp10.907.500</td> </tr> </table> <p><b>Informasi:</b> (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Pembebatan pada kode kegiatan</b></td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">KODE KEGIATAN</th> <th style="text-align: center;">URAIAN</th> <th style="text-align: center;">NILAI</th> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">SPD - 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9.02.02.3.02</td> <td style="text-align: center;">Pelaksanaan Hak dan Kewajiban</td> <td style="text-align: center;">Rp220.900.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9.02.02.3.02.01</td> <td style="text-align: center;">Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota</td> <td style="text-align: center;">Rp220.900.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.1.02.02.01.0003</td> <td style="text-align: center;">Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</td> <td style="text-align: center;">Rp220.900.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">Jumlah</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">Rp220.900.000</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>SPM yang Dibayarkan</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah yang Diminta (Bruto)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Rp220.900.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah Potongan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Rp10.907.500</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah Netto</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Rp209.992.500</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah yang Dibayarkan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Rp220.900.000</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Uang sejumlah: (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">     </div>	<b>Potongan-potongan:</b>				No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah	1	PPH 21	028339540015075	Rp10.907.500				Jumlah				Rp10.907.500	<b>Pembebatan pada kode kegiatan</b>		KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	SPD - 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023			9.02.02.3.02	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	Rp220.900.000	9.02.02.3.02.01	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Rp220.900.000	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp220.900.000			Jumlah			Rp220.900.000	<b>SPM yang Dibayarkan</b>		Jumlah yang Diminta (Bruto)		Rp220.900.000		Jumlah Potongan		Rp10.907.500		Jumlah Netto		Rp209.992.500		Jumlah yang Dibayarkan		Rp220.900.000	
<b>Potongan-potongan:</b>																																																														
No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah																																																											
1	PPH 21	028339540015075	Rp10.907.500																																																											
			Jumlah																																																											
			Rp10.907.500																																																											
<b>Pembebatan pada kode kegiatan</b>																																																														
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI																																																												
SPD - 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023																																																														
9.02.02.3.02	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	Rp220.900.000																																																												
9.02.02.3.02.01	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Rp220.900.000																																																												
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp220.900.000																																																												
		Jumlah																																																												
		Rp220.900.000																																																												
<b>SPM yang Dibayarkan</b>																																																														
Jumlah yang Diminta (Bruto)																																																														
Rp220.900.000																																																														
Jumlah Potongan																																																														
Rp10.907.500																																																														
Jumlah Netto																																																														
Rp209.992.500																																																														
Jumlah yang Dibayarkan																																																														
Rp220.900.000																																																														
<p><b>Jumlah SPP yang Diminta:</b> <b>Rp220.900.000</b>  <i>(terbilang: dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)</i></p> <p><b>Nomor dan Tanggal SPP</b>  37.00/02.0/000291/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21-12-2023</p>																																																														
<p><i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA</i></p>																																																														

\*) coret yang tidak perlu

PERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH  
MAJELIS RAKYAT PAPUA

KARTA PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 37.00/03.0/000328/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 37.00/03.0/000328/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang saya ajukan sebesar Rp220.900.000 (terbilang dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan MAJELIS RAKYAT PAPUA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

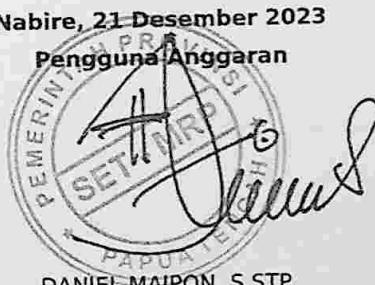
1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di MAJELIS RAKYAT PAPUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Nabire, 21 Desember 2023

Pengguna Anggaran



DANIEL MAIPON, S.STP

NIP. 197604231996121001

ERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

MAJELIS RAKYAT PAPUA

**SURAT PERNYATAAN**

**VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN  
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : MATILDA MOSE. S.Sos

NIP : 197105062003122008

jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 37.00/02.0/000291/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nabire, 21 Desember 2023

PPK SKPD



MATILDA MOSE. S.Sos

NIP. 197105062003122008

GUBERNATOR PROVINSI PAPUA TENGAH

MAJELIS RAKYAT PAPUA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS**

Nomor: 37.00/02.0/000291/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 37.00/02.0/000291/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar Rp220.900.000 (terbilang dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan MAJELIS RAKYAT PAPUA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Nabire, 21 Desember 2023

Pengguna Anggaran



DANIEL MAIPON, S.STP

NIP. 197604231996121001

GUBERNATOR PROVINSI PAPUA TENGAH

MAJELIS RAKYAT PAPUA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS**

Nomor: 37.00/02.0/000291/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 37.00/02.0/000291/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar Rp220.900.000 (terbilang dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan MAJELIS RAKYAT PAPUA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Nabire, 21 Desember 2023

Pengguna Anggaran



DANIEL MAIPON, S.STP

NIP. 197604231996121001

PROVINSI PAPUA TENGAH  
PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

02.0/000291/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023

Langsung Barang dan Jasa

SPP-LS

1. Nama Kerja	:	MAJELIS RAKYAT PAPUA
2. Nama Sub Kegiatan	:	terlampir
3. Pengguna Anggaran	:	DANIEL MAIPON, S.STP
4. PTK	:	OCTOFIANUS KARUBABA, S.Sos
5. Nama Bendahara Pengeluaran	:	MARYAM NGANGUN
6. NPWP Bendahara Pengeluaran	:	405253931954000
7. Nama Bank	:	Bank Papua
8. Nomor Rekening Bank	:	9000102000212
9. Untuk Keperluan	:	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif MRP (Bagian Keuangan) Sub Kegiatan Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Pada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sesuai daftar terlampir (OTSUS BG)
10. Dasar Pengeluaran	:	SPD nomor: 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023 tanggal 30-06-2023  Sebesar: Rp220.900.000 (terbilang: dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)

Uraian

No	Uraian	
I	<b>SPD</b>	
	Tanggal : 30-06-2023 Nomor : 37.00/01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023	Rp5.753.260.229
II	<b>SP2D Sebelumnya</b>	
	Tanggal : - Nomor : -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

OCTOFIANUS KARUBABA, S.Sos  
NIP. 197910232015031001

Nabire, 21 Desember 2023  
Bendahara Pengeluaran

MARYAM NGANGUN  
NIP. 197708042008012025



- Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD  
 Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD  
 Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran  
 Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

PROVINSI PAPUA TENGAH  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)  
02.0/000291/LS/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/12/2023  
Tahun Anggaran: 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Uraian	Jumlah
01.0/000007/9.03.0.00.0.00.22.0000/P.03/11/2023	
pelaksanaan Hak dan Kewajiban	
1. Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	
2.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp220.900.000
<b>TOTAL : Rp220.900.000</b>	

Terbilang: dua ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah.



Mengetahui/ Menyetujui,  
**Pengguna Anggaran**

DANIEL MAIPON, S.STP  
NIP. 197604231996121001

Nabire, 21 Desember 2023  
**Bendahara Pengeluaran**

MARYAM NGANGUN  
NIP. 197708042008012025

# PROVINSI PAPUA TENGAH

# MAJELIS RAKYAT PAPUA

Mandala Kelurahan Bumi wonorejo Nabire – Papua Tengah

## KEPUTUSAN SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA

NOMOR : 800 / 14 / SET MRP - PPT

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PEMILIHAN PIMPINAN DEFINITIF MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

#### SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua;
- b. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan kegiatan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua tengah di maksud, dipandang perlu untuk membentuk panitia Pelaksanaan Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Majelis Rakyat Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 9);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4321 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;

Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 103 Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028;  
Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 104 Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Daftar Urut Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028;

**MEMUTUSKAN :**

- ESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyiapkan Tempat dan Persiapan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan;
  2. Melaksanakan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah;
  3. Melaporkan Hasil Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nabire  
Pada tanggal : 19 Desember 2023



SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA  
800 / 14 / SET MRP - PPT  
: 19 DESEMBER 2023

AN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANAAN PEMILIHAN  
DEFINITIF MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

---

- I. PENANGGUNG JAWAB : DANIEL MAIPON, S.STP
- II. KETUA : MATILDA MOSE, S.Sos
- III. SEKRETARIS : RONI ABIDONDIFU, S.STP., M.Si
- IV. ANGGOTA

1. FRANSISKUS ADI, S.Sos
2. EMMANUEL MOTE, S.STP
3. BENYAMIN KARETH, SH., M.HUM
4. MENASE YOTENI, SH
5. YERMIAS BINDOSANO, SH
6. MUHAMAD TARMIZI RUMKEL, S.STP
7. BARNABAS HUKUBUN, S.Pi
8. CHRISTINA, S.Si
9. NIKSON IMANUEL WAROMI, S.IP
10. OCTOFIANUS KARUBABA, S.Sos
11. LETRINCE RARAWI, S.Sos
12. MELIAKIM MONEI, S.IP
13. YOHANNA WELMINA MANDOWEN
14. AGUNG WIRATMO, ST
15. MARYAM NGANGUN
16. LIENTJE, S.Sos
17. HOLINCE SOINDEMI, A.Md
18. MARGARETHA HELENA SAWO, A.Md
19. ADRIAN MIESFA, S.Sos., M.Si
20. YOSEP MANUARON
21. RONALD MUAL
22. YAN MANIANI
23. CHRIS MARVIN SIHASALE
24. JOHANES TAMA MARAN
25. SILVIA SIPORA SALOMINA MAREY, S.Tr.IP
26. WINARNI
27. FRIST FEDERICH RARU, ST
28. ABDULA BARAWERI
29. HERMAN LETRORA
30. HESIA MELBUKRANI
31. HILDA FIHAN MONAR
32. YULIUS WANGGAI
33. EKLEVYNA UNHEMORA
34. RIVAN TELENGGEN
35. DEREK ANTON REWANG
36. ELVIS VELIX ECBERT MARO
37. THOMSON WOISIRI
38. NEHEMIA LAWARI
39. ORPA MANUARON

IMAGESAN  
A OCTOVIA TOROBI  
MUABUAY  
AN KARLY MATHEUS, S.Kom



# MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH

Mandala Kelurahan Bumi wonorejo Nabire – Papua Tengah

## KEPUTUSAN KETUA SEMENTARA MAJELIS RAKYAT PAPUA NOMOR: 166 / 01 / KETUA MRP-PPT

### PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PEMILIHAN PIMPINAN DEFINITIF MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH PERIODE TAHUN 2023 – 2028

#### KETUA SEMENTARA MAJELIS RAKYAT PAPUA

Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua;

b. bahwa dengan telah dilantiknya Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028 oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, maka Anggota Majelis Rakyat Papua Perlu untuk melakukan pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua;

9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 9);

- an Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4321 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.4-4231 Tahun 2023 Nomor 100.2.1.4-6097 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.2-4231 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028 Tanggal 26 Oktober 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyiapkan tempat dan tata cara pemilihan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
  2. Melaksanakan atau mendampingi Proses Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah;
  3. Melaporkan hasil pemilihan Pimpinan Definitif Kepada seluruh Yang Mulia Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah dan Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nabire  
Pada tanggal : Desember 2023

**MAJELIS RAKYAT PAPUA**



SECRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA  
166/01 / KETUA MRP-PPT  
DESEMBER 2023

AGOTAAN PANITIA PELAKSANAAN PEMILIHAN PIMPINAN DEFINITIF  
MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH  
PERIODE TAHUN 2023 – 2028

KETUA	:	EREMIA MURIB, S.PK
II. WAKIL KETUA I	:	MIRNA BINGGORO HANIBORA
III. WAKIL KETUA II	:	SEM YUKEI, S.Th
IV. ANGGOTA	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. OBETH MURIB, S.Sos</li><li>2. KITIMIN WONDA</li><li>3. IRISEN WONDA</li><li>4. YULIUS WANDAGAU, SE</li><li>5. AGUSTINUS ANGGAIBAK, SM</li><li>6. THOMAS MUTAWEYAO, A.MD.PD</li><li>7. MELKISEDEK FI RUMAWI</li><li>8. KORNELES MANIAWASI</li><li>9. MELINA EDOWAI, SE</li><li>10. GERMANUS GOO, SE</li><li>11. HENDERIKUS MAGAI, S.Sos</li><li>12. YANCE YEIMO, S.Th., M.Th</li><li>13. BENNY ZONGGONAU</li><li>14. YULCE MAGAI, SE</li><li>15. PIPINA WONDA, S.Pt</li><li>16. TEMIRA WONDA, S.Pi</li><li>17. SERA TABUNI, S.Sos</li><li>18. VALENTINA KEMONG</li><li>19. MARSELLA TOMATIPI, SE</li><li>20. PAULINA MAREY</li><li>21. DEBORA MOTE, S.Sos</li><li>22. AGATA TEKEGE</li><li>23. MELIANA DOGOMO, S.IP</li><li>24. SELPINA MUYAPA, S.Sos</li><li>25. MARIA MOTE, S.Pd</li><li>26. ANASTASYA BELAU</li><li>27. YEHUDA GOBAL, S.Th. M.Si</li><li>28. WENIOR PAKAGE, SH. MH</li><li>29. YOEL MURIB, S.Sos</li><li>30. ABET NEGO TIPAGAU</li><li>31. MARTHEN KAUKI WAIBUSI. SP.M.Si</li></ol>

32. YUNUS MBAUBEDARI, S.Th
33. Pdt. GIMAN MAGAI, S.Th
34. Pdt. GUA GIRE
35. ELIAS WONDA, S.Pd
36. N.D. MATHEUS WAKERKWA, BA
37. MARIA GOBAI
38. YACOBUS TAKIMAI
39. YAHYA S. W. IYAI



PROVINSI PAPUA TENGAH  
MARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA  
Mandala Kelurahan Bumi wonorejo Nabire – Papua Tengah

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA  
NOMOR: 800/13/SET MRP/PPT

TENTANG

PENUNJUKAN MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN PEMILIHAN  
PIMPINAN DEFINITIF MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH PERIODE  
TAHUN 2023 - 2028  
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA

- Menimbang :
- bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua;
  - bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan kegiatan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, dipandang perlu Menunjuk Moderator dan Pembawa Acara untuk mendampingi dan pada Kegiatan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode 2023 – 2028;
  - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Majelis Rakyat Papua.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- Permen Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4321 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.4-4231 Tahun 2023 Nomor 100.2.1.4-6097 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.2-4231 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028 Tanggal 26 Oktober 2023;
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua;
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 tentang Penyusunan Tata Tertib bagi Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Priode 2023-2028, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukan Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Priode 2023-2028 dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas ikut berpartisipasi dalam acara kegiatan tersebut sesuai Tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nabire  
Pada tanggal : 10 Desember 2023

SEKRETARIS  
MAJELIS RAKYAT PAPUA

DANIEL MAIPON, S.STP  
NIP. 19760423 199612 1 001

SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA  
JL. 17/17 SET MPP PAP  
: 19 DESEMBER 2023

MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN PEMILIHAN  
MAJELIS RAKYAT PAPUA PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH PERIODE  
TAHUN 2023 - 2028  
TAHUN ANGGARAN 2023

---

I. MODERATOR : DANIEL MAIPON, S.STP

II. PEMBAWA ACARA : CHRISTINA, S.Si

SEKRETARIS  
MAJELIS RAKYAT PAPUA  
  
DANIEL MAIPON, S.STP  
NIP. 19760423 199612 1 001